

PERISTIWA MANDOR 28 JUNI 1944 DI KALIMANTAN BARAT: SUATU PEMBUNUHAN MASSAL DI MASA PENDUDUK JEPANG

Muhammad Rikaz Prabowo

SMA Mujahidin Pontianak, Komplek Masjid Raya Mujahidin Pontianak Kalimantan Barat

email: rikaz.prabowo@gmail.com

Abstrak

Peristiwa Mandor pada 28 Juni 1944 yang terjadi di Kalimantan Barat pada masa pendudukan Jepang merupakan bagian dari sejarah kelam bangsa ini, dimana ribuan rakyat tidak berdosa dibantai secara keji oleh tentara *Dai Nippon*. Pembantaian ini menyisir seluruh lapisan masyarakat mulai dari keluarga kesultanan, kaum cerdik pandai, hingga rakyat biasa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Awal pendudukan Jepang di Kalimantan Barat, (2) Pecahnya Peristiwa Mandor 28 Juni 1944, (3) Dampak Peristiwa Mandor 28 Juni 1944. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yaitu: (1) Pemilihan Topik, (2) Heuristik, (3) Verifikasi, (4) Interpretasi, (5) Historiografi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, tentara Jepang mulai memasuki Pontianak pada 2 Februari 1942 dan disambut dengan baik. Jepang melakukan mobilisasi terhadap rakyat untuk kepentingan perang mereka, seperti pengerahan pemuda, pengenalan budaya Jepang dan kewajiban kerja bakti. Akan tetapi semakin lama rakyat merasa antipati karena sikap kejam tentara Jepang, serta kondisi hidup yang semakin sulit pada waktu itu. *Kedua*, Peristiwa Mandor terjadi karena kecurigaan dan kekhawatiran Jepang akan adanya aksi perlawanan rakyat. Kabar ini hanyalah isu dan seakan dibuat-dibuat. Jepang melakukan pembersihan sebagai upaya pencegahan mulai dari Oktober 1943 hingga 28 Juni 1944. Jumlah korban secara resmi menurut pemerintah Kalimantan Barat ialah 21.037 jiwa. *Ketiga*, dampak Peristiwa Mandor antara lain hilangnya generasi cerdik pandai, terpelajar, hingga tokoh politik yang dapat menjadi modal untuk membangun Kalimantan Barat. Selain itu dua belas pemimpin swapraja/kesultanan juga gugur dan menyebabkan keguncangan pemerintahannya. Kekejaman Jepang terhadap rakyat juga memantik perlawanan etno-gerilya Suku Dayak di seluruh penjuru Kalimantan Barat.

Kata Kunci: *Borneo Shinbun*, Kalimantan Barat, Mandor, *Tokkeitai*,

Abstract

The Mandor Incident on June 28, 1944, that occurred in West Kalimantan during the Japanese occupation was a dark history of this nation, where thousands of innocent people were brutally massacred by Dai Nippon's army. This massacre combed all levels of society from the family of the sultanate, the clever, to ordinary people. This study aims to describe: (1) Beginning of Japanese occupation in West Kalimantan, (2) Rupture of Mandor Incident June 28, 1944, (3) Impact of Mandor Incident June 28, 1944. This study uses critical historical methods namely: (1) Selection of Topics, (2) Heuristics, (3) Verification, (4) Interpretation, (5) Historiography. Based on the results of the study it can be concluded as follows: First, Japanese soldiers began entering Pontianak on February 2, 1942 and were welcomed. Japan mobilized the people for their war interests, such as the mobilization of youth, the introduction of Japanese culture and the obligation of voluntary work. But over time the people feel antipathy because of their cruel attitude and the more difficult life at that time. Secondly, the Mandor Incident occurred because of suspicion and concern of Japan that there would be a people's resistance. This news is just an issue and as if made.

Japan carried out cleaning as a prevention effort from October 1943 to June 28, 1944. The official number of victims according to the West Kalimantan government was 21,037 people. Third, the impact of the Mandor Incident included the loss of a generation of smart, educated, to political figures who could become capital to build West Kalimantan. In addition, twelve self-government/sultanate leaders also died and caused a shock to his government. Japanese atrocities against the people also ignited the Dayak Ethno-guerrilla resistance in all parts of West Kalimantan.

Keywords: *Borneo Shinbun*, Mandor, *Tokkeitai*, West Kalimantan

PENDAHULUAN

Perang Dunia Kedua yang berkecamuk di Eropa sejak 1 September 1939 turut berkobar hingga ke Asia Pasifik dimana Kekaisaran Jepang memulainya dengan menyerang Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii, 14 Desember 1941. Sedikit demi sedikit Jepang menaklukkan negara-negara di Asia, khususnya bagian Tenggara yang kaya akan hasil bumi dan tenaga kerja untuk kepentingan perang mereka.

Pada 2 Februari 1942 Pasukan Jepang berhasil menguasai Pontianak dan disambut dengan tangan terbuka oleh rakyat. Kedatangannya menjadi angin segar terbebasnya rakyat dari belenggu penjajahan bangsa barat (Belanda). Jepang begitu mengincar Pulau Kalimantan secara umum karena kaya akan hasil tambang yang berguna agar mesin-mesin perang Jepang tetap berjalan. Sedangkan hasil hutan seperti kayu sangat dibutuhkan untuk membangun berbagai infrastruktur perang. (Usman, 2009: 22)

Dimasa awal kedatangannya, Jepang melakukan mobilisasi terhadap rakyat untuk kepentingan mereka. Salah satunya dengan merekrut para pemuda bergabung ke organisasi militer semi-militer seperti Heiho, Seinendan maupun Keibodan. Anak-anak diwajibkan untuk sekolah dan menerima pengajaran gaya Jepang yang efektif sebagai penetrasi budaya. Dalam bidang politik, Jepang membubarkan semua organisasi politik dan menggantinya dengan Nissinkai. Jepang mengizinkan organisasi ini

karena dianggap organisasi yang mendukung Jepang.

Pada tahun 1943 Jepang mulai menaruh curiga terhadap rakyat akan melakukan perlawanan. Meskipun hanyalah sebuah desas-desus yang tidak pernah terbukti jelas. Akan tetapi Jepang mencegahnya dengan cara-cara yang sangat keji dengan melaksanakan pembunuhan massal terhadap puluhan ribu rakyat.

Mendalami kausalitas dalam Peristiwa Mandor ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Agar dapat diketahui lebih jauh apa yang menjadi penyebab Jepang melakukan pembantaian terhadap rakyat dan apa dampaknya bagi kehidupan di Kalimantan Barat. Peristiwa Mandor adalah catatan sejarah kalam bangsa ini, namun tidak mendapatkan perhatian dalam pengajaran Sejarah Indonesia.

METODE

Dalam melakukan suatu penelitian historis, maka seorang sejarawan harus berpegang teguh pada masing-masing tiap tahapan dalam metode. Metode Sejarah terdiri atas lima tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (4) interpretasi, dan (5) penulisan. (Kuntowijoyo, 2013: 69-82). Topik dalam penelitian ini adalah Peristiwa Mandor yang terjadi pada 28 Juni 1944 di Kalimantan Barat. Untuk menganalisis peristiwa ini hingga ditemukan sebab dan dampaknya maka digunakan beberapa sumber primer dan sumber sekunder yang relevan.

Sumber primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah buku berjudul *Kapal Terbang Sembilan: Kisah Pendudukan Jepang di Kalimantan Barat* karya M. Yanis, Yayasan Perguruan Panca Bhakti, 1983. Buku ini cukup lengkap membahas mengenai sejarah awal provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak pada masa awal Jepang datang Februari 1942 hingga Agustus 1945. Penulis sendiri merupakan saksi hidup sekaligus pelaku sejarah di masanya. Akan tetapi, meskipun sumber primer buku ini dikemas dalam sebuah novel dengan bahasa-bahasa sastra. Oleh sebab itu penggunaan fakta-fakta dalam buku ini harus dilakukan bersamaan dengan sumber-sumber lain sebagai pembanding.

Salah satu sumber sekunder yang digunakan adalah buku berjudul *Peristiwa Mandor Berdarah* karya Syafaruddin Usman dan Isnawati Din penerbit Media Pressindo tahun 2009. Buku ini berjenis Sumber Sekunder, namun di dalamnya berisi keterangan-keterangan primer seperti lampiran-lampiran, kopian koran, dan testimoni para pelaku sejarah yang hidup dan bahkan merasakan langsung di zamannya.

Sumber lain yakni buku berjudul *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat*, karya tim penulis yang dipimpin Ya'Achmad dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1984. Buku ini termasuk sumber sekunder yang berisi informasi cukup ringkas seputar kehidupan masyarakat Kalimantan Barat pada zaman penjajahan Jepang 1942-1945.

Tahap berikutnya adalah melakukan Verifikasi atau kritik sumber. Dilakukan secara ekstern untuk menunjukkan bahwa sumber yang digunakan autentik dan intern untuk menguji bahwa sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini kredibel. Langkah selanjutnya adalah interpretasi. Pada tahap ini, setiap fakta

dicari hubungan kausalitasnya sesuai dengan urutan terjadinya peristiwa. Fakta-fakta yang ditemukan dalam proses ini kemudian disatukan. Tahap terakhir adalah penulisan sejarah yang disusun secara kronologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Pendudukan Jepang di Kalimantan Barat

Kedatangan bala tentara Jepang di Pontianak, Kalimantan Barat tercatat pertama kali pada hari Jumat tanggal 19 Desember 1941. Di hari ketika warga lelaki hendak melaksanakan Salat Jumat, justru merasakan bom berjatuh dari langit. Bom-bom tersebut dimuntahkan dari perut pesawat bomber milik Jepang, sasaran awalnya adalah tangsi-tangsi militer KNIL di Pontianak. Nahas, bom tersebut meleset dan justru menghantam persekolahan, pasar, dan rumah penduduk.

Akibat salah target, ratusan penduduk Pontianak gugur. Padahal Jepang belum menginjakkan sepatu larsnya di Kalimantan Barat. Peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa Kapal Terbang Sembilan, sebab saat itu ada sembilan pesawat tempur Jepang dalam pemboman Pontianak. Pemboman kembali terjadi pada 22 Desember 1941 dan juga memakan korban rakyat yang tidak berdosa. (Umar, 2017: 57)

Setelah melakukan pengeboman dan peperangan darat, pasukan Jepang mulai memasuki Pontianak pada 2 Februari 1942. Pasukan KNIL yang terkenal garang terhadap kaum pergerakan Indonesia sudah terlebih dahulu kabur sebagai pecundang ke arah pedalaman. Rakyat Kalimantan Barat yang sebenarnya sudah menyimpan kebencian terhadap Belanda akhirnya menerima Jepang dengan tangan terbuka sebagai "pembebas" penjajahan barat. Sultan-sultan dan Panembahan kemudian menyatakan tunduk dan setia kepada Pemerintahan Dai Nippon. Bendera Hinomaru dikibarkan di beberapa tempat termasuk di depan istana kesultanan. (Aju, 2017: 41)

Dengan menyatakan diri sebagai saudara tua, Jepang menebar janji untuk membebaskan negara-negara di Asia dari penjajahan barat. Propaganda ini awalnya berhasil. Jepang memang melarang seluruh aktivitas politik, bahkan membubarkannya. Akan tetapi Jepang memberikan suatu kesempatan luas yang begitu disenangi rakyat.

Dalam bidang pendidikan misalnya, dibuka banyak sekolah dan semua anak dapat mengikuti sekolah tersebut tanpa diskriminasi. Sekolah dasar zaman Jepang waktu itu bernama Husu Ko Gakko. Selain mempelajari Bahasa Jepang (Nippon Go) dan menggunakan Bahasa Indonesia, setiap harinya siswa diajarkan nyanyian-nyanyian Jepang (Nippon No Uta), dan olahraga Taisho. Diberikan juga latihan baris berbaris ala militer hingga kegiatan kerja bakti (Kinrohosi). Untuk Sekolah Lanjutan setamat dari Husu Ko Gakko, pendidikan di pusatkan di Pontianak dan diberikan secara cuma-cuma serta di asramakan. (Ahmad, dkk, 1984:67)

Jepang juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk bergabung dalam organisasi militer dengan status sebagai pembantu tentara Angkatan Laut, atau Kaigun Heiho. Dikhususkan untuk pemuda berumur 16-20 tahun, tujuan awalnya dimaksudkan untuk membantu pekerjaan kasar pembangunan instalasi dan pertahanan militer. Akan tetapi dalam perkembangannya diberikan latihan dan persenjataan yang sama dengan tentara Jepang dan dikirim ikut berperang di garis depan. (Matanasi, 2011:74)

Di Kalimantan Barat sendiri hanya ada Kaigun Heiho sebab kekuasaan di Pulau Kalimantan di pegang Angkatan Laut oleh Minseifu (Dinas Administrasi Sipil Angkatan Laut). Selain mendaftar secara sukarela, perekrutan Kaigun Heiho juga diambil dari pelajar-pelajar Husu Ko Gakko (setingkat Sekolah Dasar), Sekolah Lanjutan, dan Sekolah Guru Kyooiin Yoo Seiayo. (Ahmad, 1984:74). Keibodan juga didirikan, namun dengan nama Borneo Konan

Hokokudan yang bertugas untuk membantu tugas kepolisian. Sedangkan Seinendan (barisan pemuda) dibentuk dengan merekrut mereka yang berusia 14-29 tahun. (Usman dan Din, 2009: 29) Pendirian organisasi militer dan semi-militer merupakan suatu upaya mobilisasi rakyat agar Jepang dapat memenangkan Perang Asia Timur Raya. Saat tentara Jepang sudah mulai terdesak lewat kemenangan-kemenangan sekutu di berbagai palagan pertempuran, seiring pula rakyat mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada pendudukan Jepang. Banyak kewajiban-kewajiban yang ditetapkan pemerintahan militer Jepang yang sangat memberatkan bahkan. Salah satunya keharusan Seikerei, memberikan hormat dengan menundukkan kepala dan badan, mirip gerakan ruku' saat salat.

Ketentuan Seikerei ini menjadi permasalahan karena harus dilakukan ketika bertemu dengan tentara Jepang dan saat pagi hari ke arah matahari terbit. Dahulunya di tempat yang sekarang bernama Alun-alun Kapuas, terdapat tempat yang bernama Yasukuni Jinja, setiap orang yang melewati tempat tersebut wajib berhenti dan melakukan Seikerei. Tempat ini dijaga oleh tentara, rakyat yang mengabaikannya akan dipukuli. (Ahmad, 1984: 67)

Kewajiban untuk Kinrohosi (kerja bakti) juga memberatkan rakyat. Saban minggu baik pelajar maupun rakyat yang dirasa cukup kuat dikerahkan Jepang untuk melakukan kerja bakti membangun infrastruktur baik keperluan sipil maupun militer. Perlahan kewajiban ini berkembang menjadi suatu praktik Romusha yang kejam dan banyak korban karenanya.

Pendirian sekolah-sekolah bagi bumiputra, kewajiban menyanyikan lagu-lagu Jepang, berbahasa dan menulis dalam tulisan Jepang, pentas kesenian Jepang, dan lain sebagainya mulai disadari rakyat jika hal tersebut semata diberikan sebagai suatu penetrasi kebudayaan agar rakyat memiliki cara

berpikir dan bertindak layaknya orang Jepang.

Rakyat tidak punya pilihan lain, menolak program yang telah ditetapkan pemerintah pendudukan sama dengan bertemu dengan penyiksaan bahkan kematian. Pemerintah Kaigun tidak memberi ruang sedikit pun agar rakyat memiliki kebebasan berekspresi apalagi kegiatan politik. Hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di Jawa dimana pergerakan kebangsaan mulai diperlonggar menjelang akhir tahun 1944.

Semakin hari kehidupan rakyat dalam bidang sosial maupun ekonomi kian sulit. Di bidang sosial banyak penduduk Pontianak, terutama orang-orang Tionghoa menyingkir melarikan diri ke daerah pedalaman. Jalanan sepi dan seperti kota mati, terlebih malam hari. Tidak ada rakyat yang berani keluar rumah.

Bagi kaum wanita, kehidupan di masa ini bak tinggal di dalam neraka. Pada September 1943, Jepang membentuk empat rumah bordil dimana wanita penghiburnya (Jugun Ianfu) diambil secara paksa dari rumah-rumah penduduk. Belakang rumah bordil ini bertambah menjadi enam tempat. Untuk memenuhi tenaga wanita penghiburnya, Jepang menangkap wanita baik pribumi atau keturunan Tionghoa yang pernah menjalin hubungan dengan tentara Jepang. Rumah bordil ini juga ada di tempat lain di luar Pontianak seperti di Singkawang dan Sintang. (Post, ed. 2010: 193)

Di bidang ekonomi juga tidak kalah mengkhawatirkan, sembako sangat susah didapatkan dan jika ada harganya sangat mahal. Pasar-pasar kehilangan keramaian karena Jepang menutup pengiriman kebutuhan pokok yang sebenarnya didatangkan dari seberang pulau. Singkat kata janji-janji kemerdekaan yang dihembuskan Jepang hanyalah isapan jempol di wilayah Kalimantan Barat dan justru yang tampak hanyalah kesengsaraan rakyat yang bertambah

Pecahnya Peristiwa Mandor 28 Juni 1944

Pembunuhan massal yang dilakukan tentara Jepang berawal dari sebuah desas desus yang terdengar oleh pihak Jepang. Semua karena sebuah kecurigaan dimana Tokkeitai (Polisi Rahasia Kaigun) mencium adanya suatu persekongkolan untuk melawan Jepang. Tentunya upaya perlawanan ini berangkat dari kondisi kehidupan yang kian susah dan perlakuan kejam Jepang terhadap rakyat.

Berdasarkan informasi yang beredar pada April 1942, Sultan Pontianak Syarif Muhammad Al-Kadri mengundang seluruh kepala swapraja, dalam hal ini Sultan dan Panembahan di seluruh Kalimantan Barat ke Keraton Kadriyah. Inti dari undangan ini sebenarnya membicarakan kondisi kehidupan terkini. Secara bulat para pemimpin kesultanan ini akhirnya satu pendapat bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan rakyat itu ialah dengan mengenyahkan Jepang. (Soedarto dkk, 1979: 80)

Jepang kemudian mendirikan Nissinkai, semacam organisasi politik yang mendapatkan restu dari Syuutizityo Minseibu Izumi dan Letnan Kolonel Yamakawa. Organisasi ini sebagai satu-satunya wadah yang legal menurut Jepang untuk menyalurkan ide-ide politik yang tentu saja harus sejalan dengan kepentingan mereka. Akan tetapi sekuat apapun Jepang mencoba menyetir organisasi ini agar menjadi pendukung mereka, namun di dalamnya justru berhimpun orang-orang yang mengidamkan kebebasan.

Dikemudian hari kelompok aristokrat yang ingin melawan Jepang sebagaimana disebutkan sebelumnya semakin besar dengan bergabungnya sejumlah tokoh-tokoh politik Nissinkai. Orang-orang tersebut antara lain J.E Pattiasina (Kepala Urusan Umum Kantor Syuutizityo), Notosoedjono (tokoh Parindra), dan Ng Nyap Sun (Kepala Urusan Orang Asing/Kakyo Toseikatyo).

Karena gerakan ini bersifat rahasia dan bergerak secara bawah tanah, tidak ada yang mengetahui secara pasti apa nama kelompok perlawanan tersebut. Pemimpin kelompok politik tersebut bahkan tidak diketahui secara pasti pemimpinya. Kelompok rahasia ini lebih sering disebut Gerakan Enam Sembilan karena berjumlah enam puluh sembilan anggota. (Soedarto, dkk, 1979: 81) Keenam puluh sembilan orang tersebut tidak pernah diketahui siapa saja orangnya, barangkali Jepang sendirilah yang menentukan nama-namanya. Masuk dalam daftar Jepang kala itu sama saja dengan masuk dalam daftar orang yang akan dicabut nyawanya.

Suatu perlawanan akhirnya memang terjadi, namun bukan di Kalimantan Barat melainkan di Kalimantan Selatan. Mantan Gubernur Borneo pada masa Belanda, Dr. Bauke Jan Haga diketahui melakukan perlawanan terhadap Jepang dengan didukung ratusan pengikutnya, sebagian besar orang Belanda di Banjarmasin. Sayangnya pemberontakan ini gagal, Jepang menjatuhkan hukuman mati kepada 25 pemimpinya termasuk Gubernur Haga, ditambah tewasnya 250 orang-orang Belanda di interniran. Komplotan Gubernur Haga tersebut direncanakan melaksanakan aksi pada Januari 1943 dengan dibantu 800 orang. (Ahmad, 1984: 80)

Pemberontakan di Kalimantan Selatan dapat menjadi suatu inspirasi untuk melaksanakan hal serupa di Kalimantan Barat. Hal ini menjadi kekhawatiran besar bagi mereka. Untuk itu Jepang memutuskan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Secara bertahap mulai dilakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang dicurigai dari berbagai kalangan.

Pada 23 Oktober 1943, gelombang penangkapan dimulai dengan menahan penguasa swapraja, tokoh masyarakat, kaum cerdik pandai, dan menahannya di markas Tokkeitai. Beberapa kerabat dan tokoh-tokoh lain juga ditangkap dan tidak pernah kembali. Selanjutnya pada 24 Mei 1944 konferensi Nissinkai di

Pontianak berubah menjadi ajang penangkapan akbar. Seluruh peserta yang hadir ditangkap, yang lainnya dituduh di rumah masing-masing pada dini hari.

Pada hari Sabtu 1 Sitigatu 2604 atau 1 Juli 1944 koran Borneo Shinbun dalam halaman depannya mewartakan dalam judul besarnya “Komplotan Besar yang Mendurhaka untuk Melawan Dai Nippon Sudah Dibongkar Sampai ke Akar-akarnya”. Jepang mengumumkan telah melaksanakan aksi penangkapan dan menghukum mati mereka yang diduga berkomplot melawan dari tanggal 23 Oktober 1943 hingga 28 Juni 1944 (Usman dan Din, 2009: 47).

Kabar dari Koran Borneo Shinbun sangat mengejutkan warga khususnya di Pontianak. Akhirnya apa yang menjadi kegelisahan akan nasib sanak saudara, kerabat, maupun orang yang dicintai ketika dijemput Jepang terjawab sudah. Tentu rasa keterkejutan itu berlanjut pada keguncangan perasaan bagi yang ditinggalkan, terpukul dan sedih. Selama ini keluarga atau kerabat korban tidak pernah mengetahui untuk apa mereka dibawa Jepang dan kapan mereka akan dikembalikan Jepang. Pertanyaan yang menggantung tersebut akhirnya terjawab sudah dengan keharuan.

Penangkapan ini rupanya hanya suatu isu yang dibuat oleh Jepang. Tuduhan bahwa adanya gerakan yang ingin melakukan perlawanan dan membentuk Republik Rakyat Borneo Barat hanyalah isu yang direkayasa oleh Jepang. Pasalnya, sejak zaman penjajahan Belanda pun tidak pernah ada organisasi, partai, ataupun lainnya yang berkeinginan hendak mendirikan suatu Negara Borneo Barat. (Ahmad, 1984: 83)

Hal ini juga diamini oleh Tsuneo Iseki seorang Jepang yang telah menetap di Kalimantan Barat pada 1928 – 1947 dan dapat berbahasa Indonesia. Tsuneo juga bertindak sebagai juru bahasa (penerjemah) dalam Mahkamah Militer Sekutu di Pontianak yang diselenggarakan pada rentang waktu tahun 1946-1947. Menurutnya, sepanjang ia tinggal di Kalimantan Barat

tidak pernah ada gerakan-gerakan untuk mendirikan Borneo Barat, juga pada masa Jepang tidak ada gerakan-gerakan untuk melawan. Menghubungkan peristiwa di Banjarmasin pada Juni 1943 dengan keadaan di Pontianak adalah hal yang sengaja dibuat-buat.

Hayashi Shuichi, seorang Perwira Intelijen tentara Angkatan Laut Jepang di Kalimantan Barat juga bersaksi pasca perang bahwa tidak ada plot bersenjata untuk melawan Jepang sebagaimana dituduhkan oleh Tokkeitai. (Post, ed. 2010: 214). Hal ini juga semakin didukung dengan tidak pernah diperiksanya para korban dalam sidang terbuka. Dalam Koran Borneo Shinbun para korban disebutkan dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Angkatan Laut Jepang. Akan tetapi sidang itu sendiri tidak pernah dibuka untuk umum. Kebenaran ini tidak pernah terungkap dengan jelas karena Jepang sendiri membunuh semua yang terlibat tanpa pernah diketahui bagaimana pembelaan para korban. (Ahmad, 1984: 111)

Apa yang tertulis dalam Borneo Shinbun seratus persen bukan produk jurnalistik melainkan sebuah karangan yang dibuat-buat oleh ketua redaksi yang tentu saja orang Jepang. Meskipun informasi dalam koran itu tampak sekali meyakinkan, namun sependai-pandainya ia mengarang tidak sulit menemukan beberapa hal yang ganjil. Koran itu mengaburkan pengertian mengenai suku dan kebangsaan, penulisannya juga tidak hati-hati. Misalnya, korban bernama Nasrun Sutan Pangeran tetapi justru ditulis orang Batak bukan orang Minang. Hal yang lebih menarik ialah korban dari kalangan suku Melayu ditulis “orang Indonesia”, di luar ditulis sesuai suku asalnya. (Yanis, 1983: 182)

Ada lagi satu keganjilan dalam pemberitaan di Borneo Shinbun itu, yakni soal Sultan Pontianak Syarif Muhammad Al-Kadri yang akhirnya ikut ke dalam komplotan (sebagaimana) yang dituduhkan Jepang dalam pendirian Negara Rakyat Borneo Barat. Padahal,

masih dalam berita itu juga komplotan berencana untuk membubarkan dua belas swapraja yang ada di Kalimantan Barat. (Yanis, 1983: 176) Tentulah hal ini bertolak belakang dengan kenyataan umum bahwa golongan aristokrat, raja, atau sultan semestinya menjadi pihak yang berseberangan dengan ide-ide pendirian negara berbentuk republik.

Seorang perwira NEFIS Belanda pasca kemerdekaan yang datang ke Kalimantan Barat untuk meneliti peristiwa ini, Kapten J.N, Heijbroek mengungkapkan; selain karena faktor kecurigaan terhadap adanya potensi perlawanan rakyat, Jepang juga bermaksud untuk membunuh orang-orang penting dan mereka yang memiliki otoritas politik, keunggulan ekonomi, dan terpelajar sebagai hal yang sama dilakukan Jepang di Korea dan Manchuria. Di tempat itu orang-orang dengan strata sosial atas juga dimusnahkan sehingga strata di sosial di bawahnya dapat di kontrol langsung oleh Jepang. (Post, ed. 2010)

Peristiwa tanggal 28 Juni 1944 bukanlah akhir dari pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan Jepang. Berdasarkan catatan-catatan sejarah, tanggal 28 Juni 1944, hanyalah suatu puncak gelombang pembunuhan yang setelahnya terus terjadi hingga mereka bertekuk lutut di hadapan sekutu. (Penjelasan Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2007). Untuk mengenang peristiwa keji itu, setiap tanggal 28 Juni diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat dimana setiap instansi negeri atau swasta diwajibkan untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang.

Dampak Peristiwa Mandor 28 Juni 1944

Operasi Pembantaian yang dilakukan Jepang sepanjang bulan Oktober 1943 hingga bulan Juni 1944 menghasilkan dampak luar biasa bagi tatanan kehidupan rakyat. Setidaknya ada tiga dampak akibat peristiwa ini, yaitu: (1) hilangnya generasi kaum cerdas, pandai,

(2) terganggunya pemerintahan feodal lokal, (3) terjadinya perlawanan etno-gerilya hebat terhadap Jepang. Ketiga hal ini akan dibahas satu persatu, akan tetapi perlu diketahui lebih dahulu berapa korban sebenarnya dari peristiwa keji ini. Menentukan angka jumlah korban yang valid memang cukup sulit. Hal ini dikarenakan minimnya sumber tertulis dan tidak tercatat dengan baik. Jika ada catatan/dokumen mengenai jumlah korban pun, kemungkinan sudah dimusnahkan oleh tentara Jepang daripada jatuh ke tangan sekutu. Walhasil soal jumlah korban hingga saat ini masih penuh perdebatan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara resmi menggunakan angka korban sebanyak 21.037 jiwa. Angka tersebut berdasarkan hasil penelitian dengan mengumpulkan berbagai data baik tertulis maupun lisan. Munculnya angka demikian sebenarnya berasal dari pernyataan Kiyotada Takahashi, mantan Opsir Syuutiztyo Minseibu di Pontianak yang berkunjung ke Mandor pada Maret 1977. Ia menyebutkan memiliki catatan tentang jumlah yang ditangkap dan dibunuh secara massal sebanyak 21.037 orang. Keterangan dari Takahashi ini dikutip oleh Alm. Mawardi Rivai (jurnalis). (Usman, Din, 2009: 47)

Meskipun angka tersebut masih menjadi perdebatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengklaim telah melakukan pencocokan dengan angka yang tercatat pada dokumen perang di Tokyo. Angka di atas 20.000 jiwa juga bersumber dari sumber lisan pada orang-orang yang hidup sezaman kala itu dan mendasarkannya setelah membaca lengkap koran Borneo Shinbun tanggal 1 Juli 1944. Di koran tersebut jumlah korban yang Jepang musnahkan sekitar 20.000 orang dan terdapat di halaman ketiga, akan tetapi bukti tertulis dari Koran Borneo Shinbun yang disimpan di Kantor Arsip Provinsi Kalimantan Barat hanya terdiri dari halaman pertama dan kedua. (Usman, Din, 2009: 70-76)

Sebaliknya Jepang baik pemerintahnya maupun Minseifu tidak

pernah secara resmi mengeluarkan berapa jumlah korban yang telah mereka bantai. Akan tetapi dalam persidangan Mahkamah Militer Sekutu terhadap para petinggi Jepang di Pontianak pada 1946, mereka hanya mengaku membunuh 1000 jiwa saja.

Berbagai kalangan baik dari pihak keluarga korban maupun saksi meragukan Jepang hanya membunuh sekitar 1000 orang saja. Hal ini semakin dikuatkan dengan kesaksian Soichi Yamamoto, mantan komandan Tokkeitai, dalam persidangan Mahkamah Militer Sekutu di Pontianak. Dalam keterangannya target penangkapan yang direncanakan sebenarnya adalah 50.000 orang namun belum sempat terlaksana penuh karena kekalahan Jepang. (Usman, Din, 2009: 78-79)

Pembantaian tidak hanya terjadi di Mandor, namun juga terjadi di wilayah lain di luar Kalimantan Barat seperti Sambas, Singkawang, Landak termasuk di Pontianak. Akan tetapi jumlah korban terbanyak ditemukan berada di Mandor. Di Kalimantan Barat sendiri penyiksaan kepada rakyat juga dilakukan oleh para mandor perusahaan Jepang yang tentu saja di topang oleh militer mereka. Pengerahan romusa untuk kepentingan ekonomi Jepang menyedot tenaga rakyat yang sangat banyak jumlahnya. Sebagai contoh, lokasi pertambangan Petikah yang terletak di sekitar hulu Sungai Bunut, Kapuas Hulu, memperkerjakan sekitar 70.000 pekerja yang sebagian besar adalah orang Dayak.

Para pekerja ini tidak diupah dan tidak mendapatkan asupan makanan yang layak. Alih-alih sejahtera, mereka yang terlihat malas bekerja akan dipukuli oleh tentara, sedangkan yang tidak bisa bekerja akan dipukuli sampai mati. Tidak ada catatan pasti berapa jumlah pekerja tambang yang gugur di Petikah. Akan tetapi masa kerja pertambangan ini mulai dari awal tahun 1942 hingga tahun 1945 dan diperkirakan lebih dari 1000 pekerja telah menjadi korbannya. Pertambangan dan tempat kerja yang kondisinya seperti

Petikh juga tersebar di seluruh Kalimantan Barat. Usman, Din, 2009: 82-84)

Sebagaimana dampak pertama yang telah dituliskan di atas, kaum cerdik pandai yang dihilangkan Jepang sepanjang tahun 1943-1944 telah membuat daerah ini kehilangan generasi orang-orang terpelajar dan berpengaruh. Dari kalangan tenaga kesehatan antara lain: dr. Roebini dan dr. R.M Agoesdjani (Kepala dan Pegawai RS Umum Pontianak), dr. Soenarjo Martowardjojo (Kepala RS Jiwa Pontianak), dr. Luhulima (RS Umum Singkawang), dr. Raden Mas Achmad Diponegoro dan dr. R. Sunarjo Martowardoyo (Kepala dan Pegawai RS Umum Putussibau). Selain tenaga kesehatan, Jepang juga membunuh beberapa tokoh yang dikenal sebagai ahli/pekerja profesional seperti Raden Sukrisno dan Sawon Wongso Oetomo (Jaksa), Raden Mas Soedijono (Operator Radio), Oeray Abdul Hamid (Pengawas Sekolah), dan Lim Bak Hwat (Kepala Sekolah Tionghoa). Sebenarnya masih banyak lagi orang-orang terpelajar seperti di atas yang dibunuh Jepang, terutama dari kalangan guru, tokoh-tokoh politik seperti Notoedjono, Panangian Harahap, J.E Pattiasina, tokoh-tokoh Tionghoa, dan pemuka masyarakat lainnya. (Soedaro, dkk, 1978: 83)

Pembunuhan kaum terpelajar ini menyebabkan Kalimantan Barat kekurangan tenaga dan ahli-ahli terampil di masa awal kemerdekaan. Sehingga perkembangan provinsi ini bisa terbilang lambat dahulunya dan selalu tertinggal dari daerah lainnya di Indonesia.

Peristiwa Mandor juga menyebabkan keguncangan pada dua belas kesultanan Melayu di Kalimantan Barat sebagai dampak keduanya. Entah apa dosa para penguasa lokal seperti para Sultan dan Panembahan terhadap Jepang hingga mereka juga masuk dalam daftar orang-orang yang harus dibunuh. Tuduhan Jepang akan keterlibatan mereka dalam kelompok yang akan memberontak adalah alasan yang dibuat-buat. Sultan

dan Panembahan yang menjadi korban tersebut antara lain (Ahmad, 1984: 111):

1. Syarif Muhammad Alkadri (Sultan Pontianak)
2. Gusti Muhammad Thaufik Aqamaddin (Panembahan Mempawah)
3. Sultan Muhammad Ibrahim Tsafioedin (Sultan Sambas)
4. Gusti Abdul Hamid (Panembahan Ngabang)
5. Gusti Saoenan (Panembahan Ketapang)
6. Tengku Idris (Panembahan Sukadana)
7. Gusti Mesir (Panembahan Simpang)
8. Ade Muhammad Arief (Panembahan Sanggau)
9. Gusti Djafar (Panembahan Tayan)
10. Gusti Kelip (Panembahan Sekadau)
11. Raden Abdulbahri Danu Perdana (Panembahan Sintang)
12. Syarif Saleh Al-Idrus (Panembahan Kubu)

Dalam praktiknya penangkapan dan pembunuhan, juga turut menangkap keluarganya. Sebagai contoh, Sultan Pontianak ditangkap bersama ketiga pangeran dan kerabatnya. Tidak kurang sekitar 30 anggota kerabat Kesultanan Pontianak turut menjadi korban. (Usman, Din, 2009: 171)

Akibat peristiwa itu, sebanyak dua belas kesultanan Melayu di Kalimantan Barat mengalami keguncangan bahkan ada juga yang berakhir karena Sultan dan Panembahan mereka telah dipancing Jepang. Seperti Kesultanan Pontianak dan Sambas yang karena hal ini mengalami kekosongan jabatan sultan hingga baru terisi pasca kemerdekaan Indonesia

Perlakuan Jepang yang kejam dan tidak mengenal belas kasihan akhirnya benar-benar mendorong terjadinya

perlawanan di Kalimantan Barat. Akan tetapi perlawanan ini tidak ada sangkut pautnya dengan “Kelompok Enam Sembilan”, melainkan suatu perlawanan bersenjata oleh etnis Dayak.

Peristiwa Mandor tidak terlalu berpengaruh bagi orang-orang Dayak, sebab tidak ada keluarga aristokrat, kaum cerdik pandai, atau aktivis politik dari Suku Dayak. Sehingga tidak ada peran sosial-politik atau pengaruh dari Suku Dayak yang menjadi tantangan bagi penjajahan Jepang. (Tanasaldy, 2014: 75)

Perlawanan ini awalnya disebabkan karena perkelahian Osaki, Kepala Perusahaan Kayu Nitinan di daerah Meliau yang hendak membunuh tokoh berpengaruh Dayak karena tidak disetujui untuk menikahi seorang putri Dayak. Osaki justru tewas setelah berkelahi dengan Pang Linggan dan Pang Suma. Tewasnya Osaki merupakan suatu klimaks dari kondisi romusha yang amat memprihatinkan akibat bekerja di perusahaan kayu Nitinan pimpinannya. Masyarakat Dayak sudah muak dengan perlakuan kasar darinya, namun belum berani melawan.

Melalui suatu mufakat adat, diputuskan untuk terus berjuang mempersiapkan perlawanan terhadap Jepang. Untuk itu diedarkanlah Mangkok Merah untuk menggalang persatuan seluruh suku Dayak Mangkok Merah merupakan sebuah alat konsolidasi dan mobilisasi pasukan lintas sub-suku Dayak yang efektif dan efisien. Mangkok Merah merupakan simbol dimulainya peperangan. Mangkok Merah diedarkan dari kampung ke kampung. Kampung yang dilewati harus siap sedia untuk perang dan membantu saudara-saudara mereka yang disakiti atau dibunuh. (Superman, 2017: 8)

Pasukan-pasukan Dayak ini kemudian lebih dikenal dengan Angkatan Perang Majang Desa (APMD) yang dikomandoi Pang Suma. Perlawanan dimulai dengan menyerang perusahaan-perusahaan milik Jepang yang mendapatkan perlindungan dari tentara Jepang.

Berita perlawanan ini terdengar Jepang hingga ke Pontianak dan mengirimkan ekspedisi untuk menghabisi pasukan Pang Suma yang terdiri dari tentara Kaigun reguler, tentara Kaigun Heiho, dan Keibeitai (Polisi Militer) yang dipimpin oleh Letnan Takeo Nakatani. Sesampai di Desa Kunyil Nakatani mendapatkan perlawanan dari pasukan Pang Suma. (Herianto, Hijriah, 2017: 9-10) Seketika dalam suatu kesempatan terjadi pertempuran yang sebenarnya tidak seimbang. Pertempuran berhasil dimenangi pasukan Dayak dan Letnan Takeo Nakatani berhasil dipancung kepalanya oleh Pang Suma.

Dalam pertempuran itu, turut berhasil ditewaskan pula Kaisu Nagatani seorang Keibeitai pengelola perusahaan ekspedisi Jepang di Meliau. Tewas pula Yamamoto pada 13 Juni 1945, kepala perusahaan Sumitomo Shokusan Kabushiki Kaisha (SSKK). Ia diberi gelar sebagai Tuan Pentong karena terkenal dengan sikap buruknya yakni suka “mementung” kepala para pekerja. Orang Jepang lain yang berhasil dipancung ialah Bunken Kanrikan daerah Tayan, Miyagi. (Prabowo, 2018: 15-17)

Pada 24 Juni 1945, Pasukan Dayak pimpinan Pang Suma berhasil membebaskan daerah Meliau dan menjadi simbol kemenangan Pasukan Dayak melawan Jepang. Meliau hanya dapat dipertahankan hingga tanggal 17 Juli 1945 lewat ekspedisi kedua Jepang. Pang Suma, Pang Linggan dan Pang Ape dan banyak pasukannya gugur ditembak Jepang dalam pertempuran ini.

Gugurnya Pang Suma, Pang Linggan, dan martir perjuangan lainnya, nyatanya tidak membuat perlawanan terhadap Jepang surut. Memasuki bulan Agustus 1945 perlawanan terhadap Jepang justru makin menjadi, dari perlawanan secara sporadis berkembang menjadi perang gerilya. Perlawanan etno-gerilya ini makin menjadi setelah orang-orang Dayak mengetahui para Sultan/Panembahan, sosok yang cukup dihormati bagi mereka, juga telah

dibunuh Jepang. Gencarnya perlawanan ini menyebar dari Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, Landak hingga Ketapang. Jepang sebenarnya berhasil mengembalikan kontrol pemerintahan di kota-kota tersebut, namun gagal dalam memadamkan perlawanan secara penuh. (Tanasaldy, 2014: 76-77)

KESIMPULAN

Aksi pembunuhan massal atau Peristiwa Mandor menjadi luka sejarah yang sulit dilupakan bagi generasi setelahnya. Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat digunakan sebagai jawaban seputar permasalahan yang telah ditetapkan di awal.

Pertama, Pasukan Jepang mulai memasuki Pontianak pada tanggal 2 Februari 1942 dan diterima dengan baik oleh segenap rakyat dan kesultanan. Di masa awalnya Jepang melakukan propaganda-propaganda agar dapat mengundang simpati rakyat. Anak-anak diwajibkan bersekolah, budaya-budaya Jepang di ajarkan, pemuda terpilih dimasukkan dalam Kaigun Heiho, Seinendan, dan Keibodan. Singkat kata rakyat wajib mendukung mobilisasi Jepang untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Akan tetapi kehidupan di masa Jepang kian hari kian terasa sulit. Sembako susah didapatkan, Jepang menutup akses distribusi antar daerah. Kebebasan berbicara atau berpolitik benar-benar ditutup. Tindak tanduk Jepang juga mulai melakukan kekerasan dan kekejaman yang justru membuat rakyat antipati. Perlahan rakyat mulai sadar bahwa janji-janji kemerdekaan yang Jepang propagandakan hanya suatu kebohongan. Kedua, Peristiwa Mandor dilatar belakangi kecurigaan Jepang akan adanya pemberontakan rakyat. Hal ini semakin menguat tatkala Jepang berhasil menumpas komplotan eks Gubernur Borneo masa Hindia Belanda, Bauke Jan Haga dan ratusan pengikutnya di Kalimantan Selatan. Kecurigaan itu

dibalas Jepang dengan melakukan upaya pencegahan, penangkapan terhadap tokoh penguasa swapraja seperti Sultan/Panembahan, kaum terpelajar, cerdik pandai, hingga rakyat biasa. Penangkapan yang berujung eksekusi itu terus terjadi rentang Oktober 1943 hingga akhirnya Jepang mengumumkannya dalam koran Borneo Shinbun tanggal 1 Juli 1944. Jumlah korban yang gugur masih menjadi perdebatan, namun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meyakini secara resmi sebanyak 21.037 jiwa telah dibantai Jepang.

Ketiga, aksi pembunuhan massal Jepang ini berdampak luas biasa bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Barat bahkan bagi beberapa tahun setelahnya. Wilayah ini kehilangan generasi emas dari kalangan terpelajar dan tokoh politik yang sedianya menjadi bekal untuk pembangunan provinsi ini setelah kemerdekaan. Peristiwa ini juga menyebabkan terbunuhnya dua belas Sultan/Panembahan pemimpin swapraja Pontianak, Sambas, Mempawah, Kubu, Tayan, Sanggau, Sintang, Sekadau, Ngabang, Ketapang, Sukadana, dan Simpang. Kekejaman Jepang juga mengakibatkan perlawanan etno-gerilya oleh Suku Dayak pimpinan Pang Suma yang berhasil menewaskan sejumlah pejabat dan komandan militer Jepang. Perlawanan suku-suku Dayak terhadap Jepang terus berkobar meluas hingga menjelang proklamasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ya, dkk. 1984. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat*, Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Aju. 2017. *Kalimantan Barat: Lintasan Sejarah dan Pembangunan dari Era Kolonial Belanda-Tahun 2013*, Pontianak. Derwati Press

- Herianto, Amanah Hijriah. 2017. *Sejarah Kerajaan Sanggau*, Pontianak: , Balai Bahasa Kalimantan Barat
- Kuntowijoyo, 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Matanasi, Petrik. 2011. *Sejarah Tentara: Munculnya Bibit-bibit Militer di Indonesia Masa Hindia Belanda sampai Awal Kemerdekaan Indonesia*, Yogyakarta Penerbit Narasi.
- Prabowo, Rikaz. 2018. *Revolusi Oktober 1946 di Kalimantan Barat*, Pontianak: Enggang Media
- Soedarto, dkk. 1979. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Superman, 2017. *Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat Tahun 1967*. *Jurnal Historia*, 5 (1), hlm. 8.
- Tanasaldy, Taufiq. 2014. *Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia: Dayak Politics of West Kalimantan*, Leiden: KITLV
- Umar, R.M, dkk. 2017. *Melacak Jejak Sejarah Kalimantan Barat*, Pontianak: C.V Derwati
- Usman, Syafaruddin, Isnawati Din. 2009. *Peristiwa Mandor Berdarah: Eksekusi Massal 28 Juni 1944 oleh Jepang*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yanis, M. 1982. *Kapal Terbang Sembilan: Kisah Pendudukan Jepang di Kalimantan Barat*, Pontianak: Yayasan Panca Bhakti.